

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Konsep Otonomi Daerah

Seperti yang diketahui semenjak orde reformasi bergulir ditahun 1998, ditahun 1999 lahir Undang-undang No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui undang-undang tersebut daerah selaku otak dari penentu pembangunan diwilayahnya sendiri memiliki kekuasaan untuk mengtur dan mengurus daerahnya sendiri untuk dapat bersaing disegala bidang. Untuk menguatkan konsep tersebut ditahun 2004 melalui peraturan perundang-undangan, dibentuk undang-undang baru pada tanggal 15 Oktober 2004, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti dengan dibentuknya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

Adanya pembaharuan pada undang-undang yang telah dibuat ditahun 1999, menjadi jawaban atas tuntutan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan merata kaitannya dengan pengaplikasian daerah otonom. Seperti yang diketahui bahwa kedua undang-undang tersebut menjadikan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaanya dilakukan melalui prinsip otonomi daerah dan peningkatan pada poros demokrasi maupun kinerja daerah dalam rangka peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang terbebas dari masalah korupsi, kolusi dan

nepotisme. Sementara itu, dengan dibentuknya Undang-undang No 32 dan 33 ditahun 2004, konsep tentang otonomi daerah diperkuat lagi dengan penambahan beberapa point baru. Dalam undang-undang yang baru disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, pendapatan daerah lain-lain yang sah. Adapun pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan berasal dari daerah itu sendiri seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Melalui pendapatan-pendapatan yang diperoleh tersebut, diharapkan daerah mampu menciptakan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah otonom.

B. Konsep Pembangunan

Arsyad dalam Erawati dan Yasa (2011) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru, pembangunan industri-industri alternatif, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta. Sedangkan dalam konsep yang dijelaskan oleh Adisasmitra (2005), disebutkan bahwa konsep

pembangunan termasuk didalamnya pembangunan ekonomi daerah juga merupakan suatu proses, yaitu proses dimana adanya perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk peningkatan jumlah dan kualitas produktifitas, identifikasi pasar baru dan adanya suatu proses transformasi pengetahuan.

Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara bisa terintegrasikan menjadi lebih baik, karena dalam pembangunan tersebut terkandung beberapa indikator saling berkaitan serta mempengaruhi satu-samainya yang dapat dijadikan fungsi dari pembangunan. Adapun indikator-indikator yang dapat dijadikan fungsi dari pembangunan ekonomi terutama kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah adalah (Almulaibari, 2011) :

1. Potensi sumber daya alam
2. Tenaga kerja dan sumber daya manusia
3. Investasi modal
4. Prasarana dan sarana pembangunan
5. Transportasi dan komunikasi
6. Komposisi industri
7. Teknologi
8. Situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah
9. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah
10. Kewirausahaan
11. Kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas

C. Konsep Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan yang terjadi pada output perkapita dalam jangka panjang atas penggunaan beberapa faktor yang dapat menstimulus proses pertumbuhan tersebut (Boediono, 1999). Sedangkan menurut Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas secara bertahap dan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adanya peningkatan output, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, dimana antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya bisa saja diartikan berbeda. Namun umumnya, secara tradisional indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan besarnya *Gross Domestic Product* dan *Gross Domestic Regional Product* pada suatu propinsi, kabupaten atau kota. Menurut Tarigan (2004), *Gross Domestic Regional Product* (PDRB) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Di antara kedua jenis penggolongan PDRB tersebut terdapat perbedaan baik dari segi definisi maupun dari segi penggunaan (*application*). PDRB menurut harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga-harga di tahun berjalan, sedangkan PDRB menurut harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan harga tahun dasar. Dari kedua definisi tersebut jelas kedua jenis PDRB tersebut memiliki arti yang berbeda satu-samainya, yaitu PDRB

menurut harga berlaku menunjukkan besarnya penghasilan dari hasil output yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tersebut. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan menunjukkan besarnya output atau kuantitas barang yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahunnya, sesuai dengan tahun dasar yang digunakan.

Seperti yang sudah diketahui, adanya peningkatan pada output dalam suatu wilayah tidak serta-merta terjadi secara spontan, melainkan terjadi karena adanya dorongan atau stimulus dari beberapa faktor-faktor ekonomi. Menurut para ahli ekonomi terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dituangkan dalam teorinya masing-masing. Berikut ini beberapa teori yang menjelaskan proses dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya :

1. Teori Basis Ekonomi

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah:

- a. Perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi
- b. Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah
- c. Perkembangan teknologi

- d. Adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial

Sedangkan jika dilihat dari beberapa faktor penyebab kemunduran sektor basis adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan permintaan di luar daerah
- b. Kehabisan cadangan sumberdaya

Teori basis ekonomi dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) dalam (Bambang, 2008) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Dalam teori basis ekonomi bahwa semua wilayah merupakan sebuah sistem sosioekonomi yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik location quotient, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembada (*self-sufficiency*) suatu sektor.

Aktivitas perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan *non* basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan *non* basis berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Menurut Glasson (1990), Konsep dasar ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu :

- a. Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan
- b. Sektor-sektor *non* basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Sektor basis memiliki peran penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional.

Sedangkan sektor *non* basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaran bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

Strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Analisis basis dan *non* basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah atau lapangan kerja. Penggabungan lapangan kerja basis dan lapangan kerja *non* basis merupakan total lapangan kerja yang tersedia untuk wilayah tersebut. Demikian pula penjumlahan pendapatan sektor basis dan pendapatan sektor *non* basis (Tarigan, 2007). Aktivitas basis memiliki peranan penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia, 2006). LQ menggunakan rasio total nilai PDRB disuatu daerah (kabupaten/kota) dibandingkan dengan rasio PDRB pada sektor yang sama di wilayah referensi (provinsi/nasional).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor basis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis shift-share dan LQ. Selain menggunakan analisis tersebut, ada pula yang menggunakan analisis tipology klassen. Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini diantaranya ada beberapa yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Agus tri basuki pada tahun 2004 yang berjudul Analisis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Propinsi Maluku Tahun 2000-2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor yang menjadi unggulan propinsi maluku dan mencari strategi yang dapat di kembangkan di propinsi maluku. Penelitian ini menggunakan 3 alat analisis berupa *Shift Share (SS)*, *Location Quotient (LQ)* dan *Typology Klassen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Propinsi Maluku mengalami pergeseran pembangunan yang berpengaruh positif artinya pergeseran pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang signifikan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan PDRB disusul oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor angkutan. Sedangkan sektor yang mengalami perubahan negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian. Propinsi Maluku memiliki tiga sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan kepada karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki Propinsi Maluku maka dapat dikembangkan strategi pembangunan ekonomi yang mengarah kepada pengembangan pertanian yang mendukung industri pariwisata dan perdagangan bebas, dengan alasan:

1. Perdagangan bebas Zona Asean sudah di mulai , sehingga kita harus selalu berfikir tentang globalisasi
2. Propinsi Maluku sangat berdekatan dengan Philipina dan sehingga pengembangan pariwisata juga diarah ke Propinsi Ambon dan sekitarnya

3. Pertanian, perdagangan, Hotel dan Restoran serta angkutan dan komunikasi masih merupakan sektor unggulan Propinsi Maluku.

Penelitian yang dilakukan oleh Rita Erika & Sri Umi Minarti W yang berjudul Analisis sektor–sektor ekonomi dalam rangka Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil pokok permasalahan sektor-sektor ekonomi manakah yang berpotensi menjadi unggulan dalam pembangunan ekonomi Kota Kediri serta apakah kebijakan pembangunan ekonomi kota kediri sudah sesuai dengan hasil analisis sektor yang menjadi unggulan. Metode analisis yang digunakan berupa LQ, MRP dan *Tyologi Klassen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki empat sektor unggulan yaitu Sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan komunikasi, sektor kontruksi dan sektor jasa-jasa. Sehingga kebijakan pembangunan ekonomi Kota Kediri belum sesuai dengan hasil analisis sektor yang menjadi unggulan. Karen arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Kediri tersebut hanya melihat dari sisi internalnya saja yaitu kontribusi sektoral dan sosial.